

**PENGARUH PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
Periode 2011 – 2017)**

**MUHAMMAD IQBAL
DEVI RATNA DIANA**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerimaan BPHTB dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung dalam periode 2011 – 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2011 – 2017.

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial BPHTB mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ($3,248 > 2,776$) dengan signifikansi 0,031 lebih kecil dari pada 0,050 ($0,031 < 0,050$) dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t hitung lebih besar daripada t tabel ($8,581 > 2,776$) dan signifikansi ($0,001 > 0,050$). Dan hasil uji f menunjukkan hasil f hitung lebih besar dari f tabel $108,170 > 6,94$ berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan BPHTB dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2011 – 2017.

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah

1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah, karena PAD diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Indikator yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Bandung yang merupakan Daerah Otonom, berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dan pendapatan asli daerah berperan penting untuk membiayai seluruh anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggali sumber penerimaan dari sektor pajak, oleh sebab itu wajib pajak baik perorangan atau badan, wajib melaporkan pendapatannya demi kelangsungan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerahnya, dan salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah ialah pajak daerah.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 disini disebutkan pula bahwa ada 11 jenis pajak daerah terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun penulis tertarik untuk meneliti pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah, karena dilihat dari tahun ke tahun semakin banyaknya pembangunan *property* di kabupaten Bandung, besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi. Akibat dari kejadian transaksi BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak. Begitupun dengan pajak air tanah banyaknya perusahaan industri di kabupaten Bandung yang memakai air bawah tanah sebagai bahan untuk berjalannya perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak air tanah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 pasal 1 ayat 32 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi pajak daerah diharapakan mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan menambah secara signifikan pendapatan asli daerah.

Pemkab Bandung meraup pendapatan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di tahun 2016 sebesar Rp 125 miliar. Pencapaian ini menunjukkan tingginya transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung. Kepala Bidang Pendapatan II Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Awan Herman mengatakan realisasi tahun lalu tersebut melampaui target lebih dari 100% di mana sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 94 miliar. "Kalau untuk tahun 2017 target BPHTB bisa mencapai Rp 105 miliar yang sampai saat ini sudah terealisasi Rp 75 miliar," ungkap Awan kepada Balebandung.com di Kantor BKD Kab Bandung, Jumat (4/8/17). Ia optimis pada akhir tahun target Rp 105 miliar itu bisa terlampaui lagi. Akan tetapi untuk mencapai target bukan berarti tanpa kendala dalam pemungutan BPHTB masih banyak wajib pajak yang memalsukan data jumlah nominal untuk menghindari nilai pajak yang besar. Selain dari BPHTB sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Air Tanah (BaleBandung.com 04/08/2017).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24 pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pajak air tanah mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengawasan dan Operasional Badan Keuangan Daerah (BKD) Sabarudin mengatakan, "Untuk penetapan Nilai Perolehan Air untuk Pajak Air Tanah ditetapkan oleh Provinsi. Pemerintah Daerah hanya menerima pajaknya saja untuk penyetorannya juga harus terus dipantau agar tidak ada keterlambatan. Namun kendalanya masih banyak Wajib Pajak yang menunggak, dikarenakan Wajib Pajak yang sudah bangkrut/pengalihan kepemilikan tetapi masih diterbitkan datanya oleh Provinsi sedangkan pemilik yang baru tidak mau melunasi tunggakan. Pada tahun 2017 pencapaiannya sebesar Rp 10 miliar padahal masih bisa digali tetapi untuk menemukan WP sangat susah apalagi yang sudah tidak ada, ini menjadi tantangan untuk Pemerintah Daerah." Kamis (24/05/2018).

Adapun keadaan penerimaan BPHTB, Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2011 sampai dengan 2017 bahwa penerimaan BPHTB mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2012 penerimaan BPHTB sebesar Rp.85.145.652.395,00 meningkat ditahun 2013 menjadi Rp.105.966.456.312,00, terjadi peningkatan sebesar Rp.20.820.803.917,00. Akan tetapi pada tahun 2014 - 2015 menurun dan mengalami kenaikan kembali di tahun – tahun berikutnya. Pajak air tanah juga demikian setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pajak air tanah meningkat sebesar Rp.11.248.115.353,00 tetapi tahun 2017 pajak air tanah menurun kembali menjadi Rp.10.919.132.475,00. Penerimaan BPHTB lebih meningkat dari pada Pajak Air Tanah, oleh karena itu dari pencapaian kedua pajak tersebut pendapatan asli daerah pun akan bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian

**Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)|
Muhammad Iqbal, Devi Ratna Diana**

penulis berasumsi bahwa pendapatan asli daerah dapat ditentukan oleh BPHTB dan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)**".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 - 2017.
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 - 2017.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 - 2017.

3. Tinjauan Pustaka

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Definisi BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 pasal 1 ayat 41 – 42 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah : "Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, selanjutnya disebut pajak."

Menurut Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2010:149) dalam bukunya Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, menjelaskan bahwa : "Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan".

b. Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa : "Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. "

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa : "Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah."

c. Pendapatan Asli Daerah

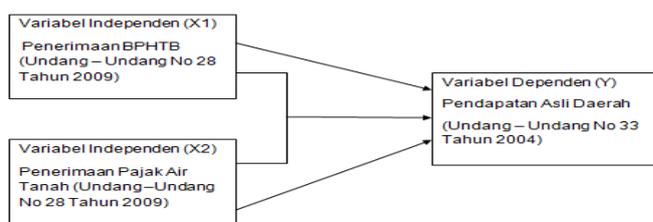
Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah : "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan dalam bukunya Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2009 : 14) menjelaskan bahwa : "Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah".

4. Paradigma Penelitian dan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan gambaran atau dasar bagi peneliti untuk menguraikan tentang BPHTB sebagai variabel independen, Pajak Air Tanah sebagai Variabel independen, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen, Serta Pengaruh Penerimaan BPHTB Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung baik secara parsial maupun simultan.

Berikut gambaran paradigma dalam penelitian ini :



Gambar 1
Bagan Paradigma Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan paradigma penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_1 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
- H_2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
- H_3 : Terdapat pengaruh secara simultan antara Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

5. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti.

b. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan keeratan yang terjadi antara BPHTB dengan pendapatan asli daerah dan pajak air tanah dengan pendapatan asli daerah.

c. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

- 1) Uji Signifikan Parsial (Uji t)
- 2) Uji Signifikansi Simultan (Hasil Uji f)

**Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)|
Muhammad Iqbal, Devi Ratna Diana**

6. Hasil Penelitian

a. Pengaruh parsial Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2011 – 2017

Dari hasil penelitian bahwa pengaruh BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar dan potensial dari tahun ke tahun. Disebabkan oleh naiknya minat masyarakat terhadap *property*, dan juga banyaknya pembangunan perumahan dan penjualan tanah maupun bangunan di Kabupaten Bandung yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Pengaruh parsial Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011 – 2017

Dari hasil penelitian bahwa pengaruh pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung terdapat pengaruh yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan dari Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup berpotensi. Banyak perusahaan industri di Kabupaten Bandung yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai bahan penunjang untuk kelangsungan berjalannya perusahaan tersebut.

c. Pengaruh simultan Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2011 – 2017

Hal tersebut ditunjukkan dalam masing-masing variabel independen yang dibahas sebelumnya memiliki penerimaan dan potensi cukup besar untuk mempengaruhi variabel dependen. Maka apabila kedua penerimaan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama akan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

7. Simpulan Dan Saran

a. Simpulan

- 1) Dari hasil uji pengaruh parsial antara penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel BPHTB mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011 - 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh naiknya minat masyarakat terhadap *property*, dan juga banyaknya pembangunan perumahan dan penjualan tanah maupun bangunan di Kabupaten Bandung yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2011 – 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Bandung yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai bahan penunjang untuk kelangsungan berjalannya perusahaan tersebut.
- 3) Secara simultan, variabel bebas penerimaan BPHTB dan pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat. Hal tersebut ditunjukkan dalam masing-masing variabel independen yang dibahas sebelumnya memiliki penerimaan dan potensi cukup besar untuk mempengaruhi variabel dependen. Maka apabila kedua penerimaan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama akan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Saran

- 1) Penerimaan BPHTB mempunyai hubungan searah yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan Penerimaan BPHTB tersebut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung guna memenuhi kebutuhan finansial Pemerintah Kabupaten Bandung yang bersumber dari daerah itu sendiri.
- 2) Pemerintah kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pajak Air Tanah dan harus dapat meningkatkan perolehan Pajak Air Tanah itu sendiri, dimana cara yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan Pajak Air Tanah bisa dengan peningkatan dibidang pelayanan seperti halnya pemerintah bisa terjun langsung ke lapangan dalam penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pajak Air tanah tersebut.
- 3) Pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat meningkatkan pendapatan dari Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dimana kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan yang kuat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk dapat meningkatkan hal tersebut diatas tentu pengelolaan dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri harus sangat baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih membahas secara menyeluruh dan mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori dan pengolahan data dari sumber datanya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung. Humaniora.
- Adisasmita Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agoes Sukrisno. Trisnawati Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat.
- Arikunto, Suharimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rosda.
- Fahmi Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung. Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul dan KusufiSyam. 2012 *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ilham wahyudi dan Wiwin Yadiati 2006. *Pengantar Akuntansi*. Pranada Media Grup. Jakarta.
- Kasmir. 2013. *analisis laporan keuangan*. Jakarta. Rajawali pers.
- L. M. Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus transaksi*. Jakarta. Rajawali Pers.

**Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)|
Muhammad Iqbal, Devi Ratna Diana**

- Nazir, Mochammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. 2010. Bandung. Penerbit Erlangga.
- Siahaan, Marihot P. 2009. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. RajawaliPers. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Syafri Sofyan. 2011, *Teori Akuntansi*. Jakarta. RajawaliPers.
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undangn No.12 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perda No. 1 Tahun 2011 Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah.
- Perda No. 6 Tahun 2016 Kabupaten Bandung, tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016, tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah